

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang semakin meningkatnya jumlah surat suara Anggota DPRD yang tertukar pada pemilu legislatif tahun 2014. Membandingkan manajemen pendistribusian surat suara pada empat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya, yang merupakan dua peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Timur yang mengalami surat suara tertukar. Peneliti juga melakukan penelitian di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang yang memiliki Dapil DPRD Kabupaten/Kota lebih banyak dan jumlah DPT di atas satu juta pemilih namun tidak terjadi surat suara tertukar. Data primer merupakan hasil wawancara, dan data sekunder diperoleh dari pengumpulan dokumen tertulis. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori manajemen logistik. Hasil penelitian menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan surat suara tertukar pada pemilu legislatif tahun 2014. Tidak mengikutsertakan penyelenggara *ad hoc* (PPK dan/atau PPS) dalam proses sortir dan lipat surat suara merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya surat suara tertukar yang mengharuskan dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Penelitian ini merekomendasikan agar KPU merevisi SOP tentang penyortiran dan pelipatan surat suara dalam pemilu legislatif, sehingga dapat meningkatkan mutu dari hasil kinerja para petugas sortir dan lipat surat suara yang merupakan faktor penentu dari berhasilnya pendistribusian surat suara.

Kata Kunci: Pemilu Legislatif, Manajemen Logistik, Daerah Pemilihan, Surat Suara.

ABSTRACT

This study discusses the increasing number of ballots of DPRD members which are swapped in legislative elections in 2014. It compares ballot distribution management in four districts in East Java Province. The research method used is qualitative. The research locations are in Nganjuk and Surabaya districts, which are the two highest rankings in experiencing ballot papers in East Java Province. The researcher also conducted research in Kediri and Malang regencies with more electoral district in DPRD Kabupaten/Kota and with more than a million voters of DPT where the case of exchanged ballot papers did not occur. The primary data is the result of interviews whereas the secondary data is obtained from the collection of written documents. The theory used to analyze the problem is the theory of logistics management. The research finds that there are several factors that cause ballot papers to be swapped in legislative elections in 2014. Excluding ad hoc providers (PPK and / or PPS) in the sorting process and folding of ballot papers is one of the factors causing the exchange of ballot papers requiring re-voting. This research recommends that the KPU revise SOP on the sorting and folding of ballot papers in legislative elections, so as to improve the quality of the performance of the sorters and folding of ballot papers which are the determinants of the successful distribution of ballot papers.

Keywords: Legislative Election, Logistics Management, Electoral District, Ballot.